



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

4 OPD Masuk Radar Kejari Rejang Lebong

CURUP - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong kini tengah gencar melakukan pendalaman sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menjadi sorotan utama penyelidikan ini. Informasi terhimpun RB, sedikitnya ada 4 OPD yang saat ini masuk dalam radar Kejari Rejang Lebong terkait adanya dugaan praktik tipikor.

Hal ini dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rejang Lebong, Fransisco Tarigan, SH MH, yang mengatakan bahwa laporan-laporan dugaan korupsi yang diterima oleh

Kejari Rejang Lebong telah memicu langkah-langkah investigasi yang lebih mendalam. Ia juga mengungkapkan bahwa upaya penyelidikan ini merupakan tindak lanjut

dari berbagai laporan yang masuk. Pendalaman ini dilakukan untuk memastikan apakah ada bukti dan fakta yang cukup untuk menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut.

"Saat ini ada beberapa OPD di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang tengah kita dalami terkait dugaan tipikor," ungkap Fransisco.

Menurut Fransisco, penyelidikan ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih bersih dan transparan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Rejang Lebong melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan bukti, wawancara saksi, hingga analisis data keuangan. Setiap langkah dalam proses ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian, mengingat kompleksitas kasus korupsi yang seringkali melibatkan jaringan yang luas dan sistematis," bebernya.

Disisi lain, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Rejang Lebong, Albert, SH, SE, AK, menambahkan bahwa ada beberapa laporan yang saat ini sedang dalam proses tindak lanjut. Namun, ia memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai detail OPD mana saja yang menjadi fokus penyelidikan. "Semua yang saat ini kita tangani sedang dalam proses penyelidikan," ungkap Albert.

Sementara itu, salah satu kasus yang saat ini tengah menjadi fokus penyelidikan adalah dugaan korupsi dalam proyek pembangunan rumah aren tahun 2021, yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 300 juta. Dijelaskan Albert, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana proyek pemerintah bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ia mengatakan, penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Rejang Lebong diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Dengan adanya penindakan yang tegas, diharapkan tidak ada lagi oknum yang berani melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini juga akan mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih jujur dan transparan di lingkungan pemerintahan daerah.

"Dalam jangka panjang, keberhasilan dalam memberantas korupsi akan berdampak positif bagi pembangunan daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat tidak lagi disalahgunakan, melainkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya," tegasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, Kejari Rejang Lebong berkomitmen untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus-kasus yang sedang ditangani. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan.

Selain itu, Kejari Rejang Lebong juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi dengan melaporkan setiap indikasi tindak pidana korupsi yang mereka temui. Partisipasi aktif dari masyarakat akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. "Nanti ya, semisal sudah ada perkembangan," tutup Albert. (slv)